

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fajar Rifa'i, 2017, "Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Penerepan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah", Skripsi Strata 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Abdul Wahab Khallaf, 1977, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Anshar.
- A Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana.
- Agrippa Pakpahan, 2009, "Peranan Profesionalisme Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun", Skripsi Strata 1 Universitas Sumatera Utara Medan.
- Agus Dwiyanto, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agus Prianto, 2006, *Menakar Kualitas Pelayanan Publik*, Malang: Intrans.
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ainur Rofiq, 2022, Uji Coba Modifikasi E-Siap, Dispendukcapil Pemkab Blitar Rakor dengan PRD 22 Kecamatan, JATIMTIMES, dalam <https://jatimtimes.com/baca/268854/20220701/201700>.
- Al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Beirut: Dar AlFikr, t.tp.
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj. 1991. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, Juz III.
- Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, 2003, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, Bayt atsTsaqafah, cetakan I.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardhia Regita M.I.S, Tri Mulyani, Endah Pujiastuti, 2021, Implementasi Pendaftaran Dokumen Administrasi Kependudukan Dengan Sistem Online Sebagai upaya Tertib Administrasidi di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Semarang Law Review (SLR) | Volume 2, Nomor 2 (2021).
- Arsip Dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- Azmiati Zuliah dan Asri Pulungan, 2020, Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal ilmiah penelitian vol. 1 No.1 Juli Tahun 2020, dalam <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id> diakses pada tanggal 10 Mei 2022.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Delasnova Lumintang, 2004, Rekontruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan sipil oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Implementasi Undnag-Undang NO.32 TAHUN 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Gema Risalah, 2011), 504.
- Dona Eriza Kharisma, 2018, “Implementasi Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar, Skripsi Strata 1 Universitas Islam Negeri Raden, Lampung.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Erna Setijaningrum, 2009, *Inovasi Pelayanan Publik*, Surabaya: PT. Medika Aksara Globalindo.
- Firma Faizatul Haqiqi, 2020, Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, *Skripsi* Strata 1 Institut Agama Islam Negri Tulungagung.
- Gede Sastrawan dan Saptala Mandala, 2019, Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007, *Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 1 Agustus 2019.
- Hamsah Hasan, 2015, “*HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*,” *Al-Ahkam* 1, no. 25.
- Hamdani Nawawi, 1996, *Pengantar Metodologi Riset*, jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gava Media.
- Hasil wawancara dengan bapak Suwandito selakau kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada Kamsi 4 Agustus 2022.
- Hasil wawancara dengan bapak Bintang Agung Silvano Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, pada Kamsi 4 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan bapak Zulham Hakim bagian Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi Dispendukcapil Kabupaten Blitar, pada Kamis 4 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan ibu Umi Fadilah selaku masyarakat pengurus dokumen kependudukan, pada Jum'at 5 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan ibu Erike Durrotul Mu'awanah selaku masyarakat pengurus dokumen kependudukan, pada Jum'at 5 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Khoirul Datin Nikmah selaku masyarakat pengurus dokumen kependudukan, pada Sabtu 6 Agustus 2022.

Ismail Nurdin, 2019, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuasa

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hal. 167.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Lexy J. Moeloeng, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Lilan Azizah, 2012, *Penerapan Digitalisasi Untuk Perpustakaan*, Jurnal Iqra'

Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utama

Muhammad Rachmadi dan Muslim, "Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam (Studi Di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Pekanbaru)", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, (Vol. 14, No. 2 2015): hal. 157, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.304>.

Muhammad Iqbal, 2007, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press

Nashuddin, 2016, *Manajemen & kepemimpinan dalam pelayanan publik*, NTB: Sanabil

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Peraturan Bupati No.38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
- Rasyid Ryaas, 1998, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Shafira Putri Nariva, 2020, "Perlindungan Hukum terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember)" Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020 dalam <https://repository.unej.ac.id>
- Subarman Munir, 2012, *Hukum Islam Dan Ketatanegaraan*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI
- Totok Jumantoro dkk, 2009, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Wahono Sumadiono, 2018, *Pedoman Umum Organisasi dan Administrasi Rukun Warga Rukun Tetangga*, terdapat di <https://books.google.co.id/books>, Jakarta: CV Budi Utama
- Wahbah al-Zuhayli, 2001, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001, vol. 1, 18
- Wahbah al-Zuhayli, 2004, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, vol. 1, 33
- Yusuf al-Qardhawi, 1996, *Min Fiqh Al-Daulah Fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq
- Zuhro, R. S. (2016). Good governance dan reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 21.